

Analisis Implementasi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab terhadap Konflik Antarsiswa: Studi Survei pada 111 Siswa Menengah di Wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat

Analysis of the Implementation of Fair and Civilized Human Values in Inter-Students Conflict: A Survey Study of 111 Middle School Students in Jakarta, Banten, and West Java

Dea Elvira¹, Riska Gusgiani², Delicia Nurhidayah³, Fauzia Isnaeni⁴

riskagusgiani786@gmail.com

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Info Article

| **Submitted:** 1 December 2025 | **Revised:** 12 February 2026 | **Accepted:** 15 February 2026

| **Published:** 15 February 2026

How to Cite : Dea Elvira, etc. "Analisis Implementasi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab terhadap Konflik Antarsiswa: Studi Survei pada 111 Siswa Menengah di Wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat", *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, Vol. 2, No. 1, 2026, P. 105-130.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Just and Civilized Humanity values in the context of inter-student conflict at school, and to understand how these values play a role in shaping students' attitudes of tolerance. The background of the study stems from the increase in verbal conflicts, stereotypes, and social friction reinforced by digital media interactions, as well as the gap between students' understanding of the values of the second principle of Pancasila and their actual behavior in the school environment. This study uses a quantitative approach with a descriptive research type to describe the implementation of the Just and Civilized Humanity values in inter-student conflict based on structured questionnaire data. Data were obtained through a closed questionnaire involving 111 students from various high schools/equivalents and four junior high school students in three provinces, and were strengthened by secondary literature sources. The results showed that the most dominant form of conflict was verbal conflict (63.1%), followed by digital conflict (45.9%), and social prejudice (47.7%). The main triggering factors included differences in students' emotions and characters (86.5%) and excessive teasing or joking (85.6%). Lack of teacher supervision (77.5%) also exacerbated the conflict dynamics. Although students understand the values of the second principle of Pancasila very well (95.5%), its implementation in behavior is still not optimal, as evidenced by the low involvement of teachers in conflict mediation and the tendency of students to avoid constructive resolutions. The study concluded that strengthening social-emotional intelligence and active teacher involvement as mediators are two important pillars for reducing conflict, strengthening tolerance, and optimizing the practice of the second principle of Pancasila in school life.

Keyword: inter-student conflict, just and civilized humanity, tolerance, social interaction, character education.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam konteks konflik antar siswa di sekolah, serta memahami bagaimana nilai tersebut berperan dalam membentuk sikap toleransi siswa. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya konflik verbal, stereotip, dan gesekan sosial yang diperkuat oleh interaksi media digital, serta kesenjangan antara pemahaman siswa mengenai nilai sila kedua Pancasila dan perilaku nyata mereka di lingkungan sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam konflik antarsiswa berdasarkan data kuesioner terstruktur. Data diperoleh melalui angket tertutup yang melibatkan 111 siswa dari berbagai sekolah menengah atas/ sederajat dan empat siswa sekolah menengah pertama di tiga provinsi, serta diperkuat dengan sumber literatur sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk konflik yang paling dominan adalah konflik verbal (63,1%), disusul konflik digital (45,9%), dan prasangka sosial (47,7%). Faktor pemicu utama meliputi perbedaan emosi dan karakter siswa (86,5%) serta saling ejek atau bercanda berlebihan

(85,6%). Minimnya pengawasan guru (77,5%) turut memperburuk dinamika konflik. Meskipun siswa memahami nilai sila kedua Pancasila dengan sangat baik (95,5%), implementasinya dalam perilaku masih belum optimal, terlihat dari rendahnya keterlibatan guru dalam mediasi konflik serta kecenderungan siswa menghindari penyelesaian yang konstruktif. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan kecerdasan sosial-emosional dan keterlibatan aktif guru sebagai mediator merupakan dua pilar penting untuk mengurangi konflik, memperkuat toleransi, serta mengoptimalkan pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sekolah.

Kata Kunci: *konflik antarsiswa, kemanusiaan yang adil dan beradab, toleransi, interaksi sosial, pendidikan karakter.*

Pendahuluan

Interaksi siswa di lingkungan sekolah tidak terlepas dari kemungkinan munculnya konflik. Baik konflik berskala kecil maupun besar kerap terjadi sebagai konsekuensi dari perbedaan pendapat, kebutuhan, dan kepentingan di antara kelompok siswa. Menurut Zulpicha (2017), konflik merupakan suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Dalam konteks lingkungan pendidikan, konflik merupakan dinamika sosial yang wajar. Dalam studinya, Zulpicha juga menambahkan bahwa konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Namun, konflik tetap dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikelola dengan tepat dan berkelanjutan.

Di berbagai sekolah, konflik yang muncul tidak hanya disebabkan oleh perbedaan pendapat, tetapi juga oleh dinamika sosial yang kompleks, seperti persaingan antarkelompok, kesalahpahaman komunikasi, hingga perbedaan karakter yang mencolok. Berbagai bentuk perselisihan ini sering memengaruhi hubungan antarsiswa dan menciptakan suasana belajar yang kurang kondusif. Fenomena seperti perundungan, saling mengejek, pertentangan antarkelompok, dan konflik interpersonal menunjukkan bahwa siswa masih menghadapi tantangan dalam mengelola interaksi sosial secara dewasa.

Kondisi ini menunjukkan kemungkinan adanya kesenjangan antara perilaku sosial siswa dengan nilai-nilai yang seharusnya mereka internalisasi, terutama nilai dalam Sila Kedua Pancasila: "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Sila ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, serta kemampuan menyelesaikan persoalan secara manusiawi. Butir-butir pengamalannya menuntut setiap warga negara, termasuk siswa, untuk menunjukkan sikap hormat, menjaga etika berinteraksi, serta menegakkan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kenyataan di sekolah menunjukkan bahwa implementasi nilai Sila Kedua belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku siswa.

Selain itu, beberapa konflik berkembang karena siswa belum memiliki kesiapan sosial untuk menghadapi perbedaan, baik perbedaan karakter, cara

berpikir, maupun gaya bergaul. Situasi ini menyebabkan banyak konflik tidak diselesaikan dengan pendekatan yang manusiawi, tetapi melalui tindakan impulsif seperti saling menyalahkan, menjauh, atau menghindari komunikasi. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai kemanusiaan belum sepenuhnya membimbing perilaku siswa dalam mengelola dinamika sosial di sekolah. Minimnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai kemanusiaan menyebabkan penyelesaian konflik menjadi kurang efektif, bahkan dalam beberapa kasus justru memperburuk hubungan sosial antarsiswa.

Situasi tersebut menjadikan isu konflik antarsiswa sebagai persoalan penting untuk diteliti. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter beradab dan manusiawi. Ketika konflik terus berulang tanpa adanya pola penyelesaian yang efektif, kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses pendidikan karakter, terutama dalam penanaman nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Beberapa penelitian terdahulu telah memotret dinamika konflik yang muncul di lingkungan sekolah dan menyoroti perlunya penguatan pendidikan karakter. Namun, berbagai penelitian tersebut umumnya membahas konflik antarsiswa secara umum sebagai bagian dari dinamika sosial di sekolah, dan belum banyak yang mengaitkannya secara spesifik dengan implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam penelitian milik Sunarwi & Amin (2025), ditunjukkan bahwa pendidikan multikultural berperan dalam menekan konflik antarsiswa melalui penanaman sikap toleransi dan saling menghargai, meskipun kajian tersebut belum secara eksplisit menempatkan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai fokus utama analisis.

Dengan kata lain, kajian yang menelaah sejauh mana lemahnya internalisasi nilai kemanusiaan memengaruhi pola interaksi dan penyelesaian konflik antarsiswa masih relatif terbatas. Salah satunya dalam penelitian Karliani et al (2024) yang membahas mengenai resolusi konflik pada siswa. Namun resolusi tersebut berupa pengembangan buku elektronik Keindonesiaan, yang dalam buku elektronik tersebut memuat materi mengenai keberagaman, komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta persatuan dan harmoni dalam keberagaman. Tidak membahas terkait nilai kemanusiaan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis konflik antarsiswa ditinjau dari implementasi nilai Sila Kedua Pancasila dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah. Kurangnya kemampuan mengelola emosi, lemahnya keterampilan komunikasi, serta rendahnya kebiasaan menyelesaikan masalah secara dialogis sering membuat konflik berlarut-larut dan semakin kompleks.

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai apa saja bentuk dan penyebab konflik antarsiswa dan apa saja upaya siswa untuk menyelesaikan

konflik di sekolah. Selain itu, penelitian ini juga menelaah sejauh mana implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam interaksi antarsiswa serta bagaimana dampak implementasi nilai tersebut terhadap konflik antarsiswa di sekolah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam konflik antarsiswa berdasarkan data kuesioner terstruktur. Penelitian kuantitatif deskriptif dinilai relevan untuk mengkaji fenomena sosial secara menyeluruh melalui pemetaan data numerik yang merepresentasikan persepsi dan pengalaman responden (Jerendi et al., 2023). Penelitian ini memaparkan kondisi dan kecenderungan responden secara objektif tanpa melakukan manipulasi variabel maupun pengujian hubungan sebab-akibat, dengan fokus pada penggambaran fenomena berdasarkan hasil survei.

Subjek penelitian ini adalah siswa sekolah menengah atas/ sederajat serta empat siswa sekolah menengah pertama yang berasal dari beberapa sekolah di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*, yaitu pemilihan responden yang dapat dijangkau dan bersedia berpartisipasi pada saat pengumpulan data, dengan kriteria responden berupa siswa sekolah menengah. Teknik ini dipilih karena keterbatasan akses peneliti terhadap seluruh populasi siswa. Responden yang memenuhi kriteria dan berpartisipasi secara sukarela dijadikan sebagai sampel penelitian. Penggunaan teknik *accidental sampling* memiliki implikasi berupa potensi bias sampel, seperti keterwakilan responden yang tidak merata antarwilayah, antarjenjang pendidikan, maupun karakteristik siswa tertentu. Oleh karena itu, hasil penelitian ini merepresentasikan kondisi empiris responden yang terlibat dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada seluruh populasi siswa menengah. Dari beberapa sekolah di tiga provinsi tempat kuesioner disebar, diperoleh sebanyak 111 siswa sebagai sampel penelitian.

Tabel 1. Daftar sekolah tempat pengambilan data

No	Nama Sekolah	Provinsi	Responden
1	SMA Negeri 1 Pamarayan	Banten	52
2	SMK Tajimalela Pamarayan	Banten	28
3	SMA Negeri 4 Kota Serang	Banten	9

4	SMK Negeri 1 Kota Serang	Banten	1
5	SMK Negeri 2 Kota Serang	Banten	1
6	SMA Negeri 13 Pandeglang	Banten	2
7	SMA Negeri 2 Pandeglang	Banten	1
8	SMK Madinatul Hadid Cilegon	Banten	1
9	MAN 2 Tangerang	Banten	1
10	SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang	Banten	1
11	SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang	Banten	1
12	SMP Negeri 1 Pamarayan	Banten	4
13	SMA Muhammadiyah 3 Jakarta	DKI Jakarta	1
14	SMK Patriot Nusantara	DKI Jakarta	2
15	SMA Negeri 1 Purwakarta	Jawa Barat	5
16	SMA Negeri 1 Muara Gembong	Jawa Barat	1

Adapun instrumen penelitian berupa angket tertutup (kuesioner) yang disusun berdasarkan indikator nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam konteks interaksi serta penyelesaian konflik antarsiswa. Instrumen penelitian ini terdiri atas 22 butir pernyataan yang dikelompokkan ke dalam lima indikator, yaitu: bentuk konflik antarsiswa (5 butir), faktor penyebab konflik antarsiswa (5 butir), upaya penyelesaian konflik antarsiswa (4 butir), implementasi nilai sila ke-2 Pancasila (3 butir), dan implikasi implementasi nilai sila ke-2 Pancasila (5 butir). Setiap butir pernyataan disajikan dalam bentuk pernyataan sikap dengan skala biner (Ya/Tidak) untuk merepresentasikan ada atau tidaknya sikap, pemahaman, maupun pengalaman responden.

Tabel 2. Contoh butir pernyataan dalam kuesioner

No	Pernyataan
1	Saya pernah mengalami konflik verbal dengan teman.
2	Saya pernah meminta bantuan guru BK untuk menyelesaikan konflik.
3	Saya memahami makna sila ke-2 Pancasila dalam hal menghargai sesama dan mencegah konflik.
4	Saya jarang mencoba memahami perasaan teman.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui survei menggunakan kuesioner daring pada tanggal 17–23 November 2025 melalui Google Form, dengan menyebarkan tautan kuesioner kepada perwakilan siswa di masing-masing sekolah. Sebelum disebarkan, kuesioner disusun dan disesuaikan agar seluruh butir pernyataan relevan dengan fokus penelitian. Selain data primer yang diperoleh melalui kuesioner, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa studi

literatur dari buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan untuk memperkuat landasan konseptual dan mendukung penyusunan instrumen penelitian.

Uji validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan menggunakan aplikasi SPSS. Uji validitas dilaksanakan dengan teknik *Pearson Product Moment* melalui perbandingan nilai r hitung setiap butir pernyataan dengan nilai r tabel sebesar 0,187 pada taraf signifikansi 5% (*two-tailed test*, $n = 111$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan yang diuji memiliki nilai r hitung $> r$ tabel, sehingga seluruh butir dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,707 yang telah memenuhi kriteria reliabilitas ($\alpha > 0,7$), sehingga instrumen penelitian secara keseluruhan memiliki konsistensi internal yang baik.

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, menampilkan frekuensi dan persentase jawaban responden pada setiap indikator dan butir pernyataan, yang selanjutnya diinterpretasikan secara naratif untuk menggambarkan kecenderungan sikap, persepsi, dan pengalaman siswa dalam konflik antarsiswa. Aspek etika penelitian diperhatikan melalui persetujuan responden yang diperoleh saat penyebaran tautan kuesioner melalui perwakilan siswa di masing-masing sekolah. Partisipasi bersifat sukarela dan identitas responden dijaga kerahasiaannya, dengan pengisian nama bersifat opsional, sementara informasi sekolah dan wilayah hanya digunakan untuk keperluan analisis penelitian.

Hasil dan pembahasan

1.1 Bentuk dan Penyebab Konflik Antarsiswa di Sekolah

Berdasarkan analisis data kuesioner yang telah diisi oleh 111 responden, dapat diidentifikasi berbagai bentuk konflik yang terjadi di lingkungan sekolah serta faktor-faktor utama yang memicunya. Temuan ini memberikan gambaran nyata tentang dinamika interaksi sosial di kehidupan sehari-hari pada kalangan siswa-siswi, yang selanjutnya akan dianalisis melalui lensa nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Tabel 3. Bentuk-bentuk konflik antarsiswa

No	Daftar Pernyataan	Frekuensi		Persentase	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Saya pernah mengalami konflik verbal dengan teman (bertengkar, sindir-menyindir).	70	41	63,1%	36,9%
2	Saya pernah mengalami konflik sosial (dikucilkan, tidak diajak kelompok).	41	70	36,9%	63,1%

3	Saya pernah berselisih dengan teman karena perbedaan kelompok pertemanan atau geng.	29	82	26,1%	73,9%
4	Saya pernah melihat atau mengalami konflik karena komentar atau unggahan di media sosial.	51	60	45,9%	54,1%
5	Saya melihat adanya stereotip atau prasangka antar siswa yang memicu konflik.	53	58	47,7%	52,3%

Berdasarkan analisis dari Tabel 3, data tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai tipologi konflik yang lazim terjadi di kalangan siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik di lingkungan sekolah tidak hanya melibatkan kekerasan secara fisik saja. Namun, telah bergeser dan didominasi oleh bentuk-bentuk perselisihan secara non-fisik, baik secara langsung maupun melalui medium digital. Bentuk konflik yang paling menonjol adalah konflik secara verbal yaitu dengan persentase 63,1%, yang termanifestasi dalam bentuk pertengkaran dan sindir-menyindir. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mengelola emosi dan menggunakan kata-kata yang sopan masih rendah. Konflik secara verbal sering dianggap sepele, padahal dapat berdampak besar pada kondisi psikologis dan menunjukkan kurangnya kemampuan untuk menghadapi perbedaan dengan tenang. Hal tersebut menegaskan bahwa nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menuntut sikap sopan dan etis ini belum tercermin dengan baik dalam komunikasi sosial siswa. Konsep nilai Kemanusiaan yang Adil berarti setiap manusia sebagai makhluk berbudaya dan beradab, pada hakikatnya dituntut untuk bersikap adil. Keadilan ini harus diterapkan dalam hubungan dengan diri sendiri, sesama manusia, masyarakat, dan juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Umam, 2018). Para siswa cenderung memilih jalur agresi verbal dibandingkan mencoba untuk berdiskusi atau mencari solusi dengan cara yang lebih damai.

Di era modern seperti sekarang ini, ruang digital juga berubah menjadi medan baru tempat berbagai bentuk konflik antarsiswa sering terjadi. Aspek modern dari konflik ditunjukkan oleh temuan bahwa sebanyak 45,9% responden mengakui, mereka pernah melihat atau mengalami konflik yang bersumber dari media sosial. Hal tersebut menegaskan bahwa sekolah tidak lagi menjadi satu-satunya *locus* (tempat) terjadinya perselisihan ataupun konflik. Media sosial telah menjadi perpanjangan konflik dari lingkungan sosial sekolah, di mana konflik yang mungkin terpendam di dunia nyata, meledak dan dilampiaskan pada media sosial. Sifat ruang digital yang serba cepat, kurangnya filter emosi, dan adanya potensi

anonimitas membuat siswa lebih berani melontarkan ujaran kebencian (*cyberbullying*) atau unggahan yang provokatif (Hidayati et al., 2023). Kenyataan ini menimbulkan tantangan baru bagi pihak sekolah untuk mengajarkan etika dan adab beraktivitas di dunia digital sebagai bagian dari nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Konflik digital seringkali luput dari pengawasan langsung guru, namun dampak yang ditimbulkannya tetap berimbas pada suasana belajar dan relasi antar siswa dikelas.

Selain itu, faktor kognitif (persepsi) juga menunjukkan prevalensi yang signifikan. Di mana sebesar 47,7% responden atau siswa melihat adanya stereotip atau prasangka antarsiswa sebagai pemicu konflik. Menurut (Liliweri, 2018) prasangka merupakan penilaian yang tidak adil karena didasarkan pada asumsi, dan hal ini bertentangan dengan nilai Kemanusiaan yang Adil. Ketika prasangka diwujudkan dalam tindakan, ia muncul sebagai lahan subur pengucilan atau bentuk diskriminasi sosial. Hal ini terkonfirmasi melalui data temuan di mana manifestasi tersebut berlanjut pada tindakan pengucilan secara nyata. Sebanyak 36,9% responden mengaku pernah mengalami konflik sosial yakni dikucilkan atau sengaja tidak diajak dalam kegiatan kelompok. Angka ini menjadi bukti empiris bahwa prasangka kognitif bukan sekadar persepsi diam, melainkan telah bertransformasi menjadi perilaku agresif relasional. Dalam konteks ini, pengucilan berfungsi sebagai alat untuk menegaskan batasan sosial, di mana siswa yang dianggap tidak sesuai dengan stereotip tertentu akan dipisahkan dari dinamika kelompok. Tindakan ini jelas mencederai hak siswa untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan inklusif di lingkungan pendidikan.

Lebih jauh lagi, prasangka dan pengucilan tersebut sering kali mengkristal dalam polarisasi kelompok. Data menunjukkan bahwa 26,1% siswa pernah berselisih karena adanya perbedaan kelompok pertemanan atau geng. Meskipun angka konflik antargeng ini merupakan yang terendah dibandingkan bentuk konflik lainnya, keberadaannya tetap tidak dapat diabaikan. Persentase angka konflik antargeng (26,1%) dibandingkan angka prasangka (47,7%) menunjukkan bahwa konflik sekolah tersebut cenderung bersifat dingin dan terselubung dalam bentuk sentimen kelompok daripada pertikaian fisik terbuka. Secara teoretis, prasangka (aspek kognitif), pengucilan (aspek sosial), dan perselisihan kelompok (aspek identitas) saling terkait dan membentuk sebuah siklus konflik yang berkesinambungan. Dampak dari siklus ini tidak terbatas pada rusaknya relasi antarpribadi di antara siswa, tetapi juga dapat mengikis rasa persatuan serta prinsip keadilan sosial yang menjadi fondasi karakter bangsa.

Tabel 4. Faktor-faktor pemicu konflik

	Frekuensi	Persentase
--	-----------	------------

No	Daftar Pernyataan	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Konflik terjadi karena perbedaan karakter atau emosi antar siswa.	96	15	86,5%	13,5%
2	Konflik dipicu oleh saling ejek, bercanda berlebihan, atau salah paham.	95	16	85,6%	14,4%
3	Media sosial menjadi salah satu penyebab utama konflik di sekolah.	56	55	50,5%	49,5%
4	Perbedaan latar belakang (agama, suku, status ekonomi) memicu konflik.	31	80	27,9%	72,1%
5	Kurangnya pengawasan guru membuat konflik siswa semakin berkembang.	86	25	77,5%	22,5%

Berdasarkan hasil yang tercantum pada Tabel 4 mengenai faktor-faktor pemicu konflik antarsiswa, menunjukkan bahwa konflik didominasi oleh dinamika interpersonal dan lingkungan pengawasan, sementara faktor eksternal seperti perbedaan latar belakang menunjukkan pengaruh yang lebih terbatas. Secara sangat signifikan, dua faktor teratas yang mendominasi yaitu perbedaan karakter atau emosi antar siswa sebanyak 86,5% dan juga faktor saling ejek, bercanda berlebihan, atau salah paham dengan persentase 85,6% pada hasil kuesioner ini menjadi episentrum konflik. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kecakapan intrapersonal (pengelolaan emosi) dan interpersonal (komunikasi efektif) sangat penting untuk mencegah konflik. Tingginya persentase terkait perbedaan emosi ini menandakan perlunya pendidikan kecerdasan emosional yang lebih terstruktur. Di sisi lain, faktor pada poin bercanda berlebihan atau salah paham ini menunjukkan bahwa banyak siswa belum mampu membaca batas sosial atau menafsirkan maksud orang lain dengan tepat, sehingga mudah terjadi gesekan. Dalam perspektif nilai Kemanusiaan yang Beradab, kemampuan menerima perbedaan karakter dan menjaga ucapan merupakan bentuk adab yang seharusnya dijunjung tinggi. Ketidakmampuan pada aspek ini menunjukkan bahwa sebagian siswa masih mendahulukan emosi dan ego dibandingkan akal sehat dan etika pada pergaulan.

Faktor dari kurangnya pengawasan guru menjadi pemicu konflik yang mendapat pengakuan tertinggi ketiga, dengan 77,5% responden menyatakan afirmatif. Hal ini memberikan kritik tajam terhadap sistem pengawasan di lingkungan sekolah. Ketika pengawasan lemah, siswa yang berpotensi menjadi pelaku ini merasa leluasa untuk bertindak semena-mena dan siswa yang menjadi korban merasa tidak terlindungi. Oleh karena itu, kurangnya pengawasan tidak

hanya membuat konflik berkembang, tetapi melanggar prinsip keadilan dalam menyediakan lingkungan belajar yang aman dan setara bagi semua siswa. Guru, seharusnya berperan sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan setiap siswa diakui hak-haknya dan dilindungi dari tindakan tidak beradab.

Konsistensi temuan terlihat dari peran media sosial yang diakui oleh 50,5% responden sebagai isu utama konflik. Angka ini menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang atau wadah yang mempertajam dan memublikasikan konflik yang sudah ada, sekaligus menciptakan ruang baru kesalahpahaman dan ujaran kebencian. Hal ini menegaskan perlu adanya intervensi yang juga menysasar pada ruang digital. Sementara itu, perbedaan latar belakang (agama, suku, status ekonomi) memiliki persentase “Ya” paling rendah yaitu 27,9%. Angka ini menunjukkan bahwa konflik berbasis SARA bukanlah isu dominan pada populasi responden. Nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan mungkin telah cukup tertanam, sehingga konflik lebih banyak bersumber dari masalah personal sehari-hari daripada isu-isu identitas yang struktural. Meski demikian, angka ini tetap perlu diwaspadai sebagai potensi konflik yang dapat muncul jika prinsip inklusivitas tidak terus dijaga.

Secara keseluruhan, temuan-temuan dari Tabel 3 dan Tabel 4 menyajikan gambaran bahwa implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab pada siswa di sekolah masih menghadapi tantangan substansial. Konflik yang terjadi didominasi oleh bentuk ketidakberadaban dan diperburuk oleh aspek ketidakadilan lingkungan. Tingginya insiden konflik karena perbedaan karakter atau emosi (86,5%) dan juga faktor saling ejek, bercanda berlebihan atau salah paham (85,6%) adalah representasi dari kegagalan internalisasi nilai Beradab. Peradaban sesungguhnya ditandai dengan kemampuan individu untuk mengendalikan nafsu dan agresi, serta berkomunikasi dengan santun dan empati. Sebaliknya, perilaku ejekan dan sindiran adalah bentuk ketidaksempurnaan moral dan ketidakmampuan berempati, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip martabat kemanusiaan.

Sementara itu, isu prasangka, pengucilan, dan kurangnya pengawasan guru menyoroti dimensi keadilan. Pengucilan adalah tindakan semena-mena yang tidak adil. Jika siswa tidak mengakui persamaan hak dan derajat teman sebayanya (seperti yang ditunjukkan oleh tingginya angka prasangka), maka nilai keadilan tidak akan pernah terwujud. Lebih penting lagi, pengakuan 77,5% responden mengenai kurangnya pengawasan guru mencerminkan adanya kelemahan sistemik dalam menjamin keadilan. Dalam filosofi Pancasila, keadilan harus difasilitasi oleh lingkungan. Ketika guru, sebagai penegak aturan, gagal

mengawasi, maka korban tidak mendapatkan hak perlindungannya, dan pelaku dibiarkan melanggar norma, yang pada akhirnya melestarikan siklus ketidakadilan dan ketidakberadaban di sekolah (Holisoh & Nur Azizah Maulidyah, 2023).

Oleh karena itu, upaya implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di sekolah tidak cukup hanya melalui indoktrinasi, melainkan harus fokus pada dua pilar utama, yaitu penguatan kompetensi sosial dan emosional siswa untuk mengelola konflik secara beradab (mengurangi *verbal abuse* dan salah paham). Kedua, peningkatan peran proaktif guru dalam pengawasan dan intervensi, sebagai wujud nyata penegakan keadilan dan keberanian membela kebenaran di lingkungan sekolah. Tanpa penguatan dua pilar ini, konflik antarsiswa akan terus menjadi hambatan dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan (Rahmat M., 2019).

1.2 Upaya Siswa Menyelesaikan Konflik di Sekolah

Berdasarkan pembahasan mengenai bentuk-bentuk konflik dan faktor penyebabnya, fokus berikutnya adalah upaya yang dilakukan siswa dalam menangani konflik tersebut, yang menuntut siswa untuk berinteraksi, mengambil keputusan, dan bertindak dalam situasi sosial yang kompleks. Hasil penelitian mengenai upaya siswa dalam menyelesaikan konflik memberikan gambaran yang menarik sekaligus menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian antara pemahaman nilai yang diajarkan di sekolah dan praktik nyata yang muncul di lingkungan sosial siswa. Ketika siswa berhadapan dengan konflik interpersonal, cara mereka merespons dan menyelesaikan konflik ternyata tidak selalu mencerminkan nilai-nilai yang tercantum dalam sila ke-2 Pancasila, meskipun nilai tersebut menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Situasi ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai kemanusiaan belum sepenuhnya mencapai ranah perilaku, terutama dalam konteks penyelesaian konflik yang membutuhkan kemampuan emosional, komunikasi efektif, dan dukungan lingkungan. Berikut ini disajikan data mengenai upaya siswa dalam menyelesaikan konflik di sekolah.

Tabel 5. Persentase upaya siswa dalam menyelesaikan konflik

No	Daftar Pernyataan	Frekuensi		Persentase	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Saya biasanya menyelesaikan konflik dengan berdiskusi langsung dengan teman yang bersangkutan.	87	24	78,4%	21,6%

2	Guru atau wali kelas terlibat dalam menyelesaikan konflik yang saya alami.	41	70	36,9%	63,1%
3	Saya pernah meminta bantuan guru BK untuk menyelesaikan konflik.	28	83	25,2%	74,8%
4	Konflik sering dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas.	53	58	47,7%	52,3%

Berdasarkan Tabel 5, hasil analisis data dari kuesioner menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar siswa memilih menyelesaikan konflik dengan berdiskusi langsung dengan teman yang bersangkutan, beberapa siswa tetap menunjukkan kecenderungan menghindari konflik atau membiarkan masalah mereda dengan sendirinya. Persentase yang tinggi pada pernyataan tersebut (78,4%) menunjukkan bahwa siswa cenderung mengandalkan komunikasi langsung sebagai pendekatan utama dalam menyelesaikan konflik interpersonal. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi penerapan nilai kemanusiaan, terutama dalam aspek saling menghargai dan pengakuan terhadap pihak lain, meskipun penerapannya belum sepenuhnya difasilitasi melalui mekanisme dialog yang terstruktur serta pendampingan dari pihak sekolah. Artinya, penyelesaian konflik yang dilakukan siswa cenderung bersifat spontan dan tidak melalui proses dialog yang terstruktur atau melibatkan pihak yang lebih kompeten seperti guru atau konselor sekolah. Dalam konteks pendidikan karakter, kecenderungan ini mengindikasikan bahwa siswa belum sepenuhnya memiliki keterampilan sosial yang diperlukan untuk menghadapi konflik secara dewasa dan beradab. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Lickona, 2012), yang menekankan bahwa pendidikan nilai tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk materi, melainkan membutuhkan proses pembiasaan, pendampingan, dan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari agar nilai tersebut benar-benar melekat dan memengaruhi perilaku.

Temuan menarik lainnya terkait rendahnya keterlibatan guru, wali kelas, maupun guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam proses penyelesaian konflik antarsiswa di sekolah. Berdasarkan pola jawaban dalam kuesioner, terlihat bahwa siswa tidak selalu menempatkan guru sebagai pihak yang mereka anggap mampu memberikan bantuan yang aman dan adil ketika terjadi konflik. Interpretasi ini muncul karena sebagian besar responden tidak memilih opsi yang melibatkan peran guru BK, wali kelas, maupun guru mata pelajaran dalam proses penyelesaian masalah, di mana (63,1%) siswa menjawab bahwa guru atau wali kelas tidak terlibat dalam penyelesaian konflik yang siswa alami di sekolah, dan (74,8%) siswa tidak pernah meminta bantuan guru BK untuk menyelesaikan konfliknya. Rendahnya kecenderungan siswa untuk melibatkan guru mengindikasikan bahwa mereka mungkin memandang konflik sebagai persoalan yang harus diselesaikan sendiri atau dibiarkan mereda tanpa campur tangan pihak sekolah. Dalam konteks

budaya sekolah di Indonesia yang masih menempatkan guru sebagai figur otoritatif, rendahnya keterlibatan guru dalam penyelesaian konflik dapat mengindikasikan adanya jarak relasional antara siswa dan guru. Kondisi ini berpotensi membuat siswa merasa kurang aman atau enggan mengungkapkan permasalahan interpersonal yang mereka alami, sehingga penyelesaian konflik lebih sering dilakukan secara mandiri atau bahkan dihindari. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa dalam konteks penelitian ini, peran guru belum sepenuhnya dipersepsikan oleh siswa sebagai pendamping yang aktif dalam membantu mengelola konflik, sehingga siswa cenderung memilih diam atau menghindar daripada mencari bantuan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Khairunnisa, 2025) yang menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal yang disertai keterbukaan dan empati dari guru BK berperan penting dalam membangun suasana yang aman sehingga siswa merasa nyaman mengungkapkan permasalahan pribadi. Jika hubungan tidak hangat atau siswa merasa tidak dipahami, maka kecenderungan untuk menghindari bantuan profesional akan semakin meningkat.

Minimnya keterlibatan guru juga menunjukkan bahwa program pembinaan karakter dan bimbingan konseling di sekolah belum berjalan optimal. Idealnya, guru memiliki peran penting sebagai mediator konflik, pembimbing emosional, dan fasilitator dialog. Namun, saat siswa tidak melihat adanya dukungan seperti itu, mereka cenderung mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang kurang konstruktif. Pada akhirnya, pola ini berpotensi berkontribusi terhadap berkembangnya kecenderungan budaya diam di sekolah, di mana konflik kecil dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, sehingga berpotensi berkembang menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Kecenderungan siswa untuk “membiarkan konflik berlalu begitu saja” juga mencerminkan adanya hambatan dalam budaya sekolah. Lingkungan yang tidak menyediakan ruang dialog atau tidak menormalisasi proses penyelesaian konflik secara terbuka dapat menciptakan rasa enggan pada siswa untuk berbicara tentang masalah interpersonal. Penelitian (Wahidin et al., 2023) menyatakan bahwa mengubur konflik tanpa manajemen yang jelas berpotensi menimbulkan akumulasi masalah sosial di sekolah, karena sumber konflik kerap timbul dari kegagalan komunikasi dan kurangnya kerja sama antarsiswa. Temuan tersebut tampak selaras dengan kondisi yang dijumpai dalam penelitian ini, yaitu sebagian siswa lebih memilih diam dan membiarkan waktu meredakan konflik, yang pada dasarnya belum dapat dikategorikan sebagai penyelesaian konflik yang konstruktif, karena tidak menyentuh akar permasalahan.

Dalam konteks pendidikan nilai, fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diajarkan dan apa yang diamalkan. Nilai kemanusiaan menekankan penghormatan terhadap martabat orang lain, sikap adil, penghargaan terhadap perbedaan, serta penyelesaian persoalan secara damai

melalui dialog. Namun, ketika siswa tidak merasa memiliki ruang aman untuk mengimplementasikan nilai tersebut, maka penyelesaian konflik akan dilakukan secara minimalis dan tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut. Pada titik ini, dukungan lingkungan sosial, terutama dari guru dan sekolah, menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Dalam jangka panjang, ketidakmampuan siswa untuk menyelesaikan konflik secara sehat dapat memberikan dampak negatif yang cukup besar. Misalnya, siswa yang terbiasa menghindari kemungkinan besar akan mengalami kesulitan dalam mengelola emosi maupun menghadapi persoalan interpersonal ketika dewasa. Penelitian (Izzul Haq et al., 2025) menegaskan bahwa siswa yang tidak memperoleh dukungan dalam menangani konflik di sekolah berisiko mengalami rasa tidak berdaya, menarik diri dari interaksi sosial dengan teman-temannya, serta memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah dalam menghadapi permasalahan yang timbul. Hal tersebut dapat berdampak pada perkembangan emosional maupun sosial siswa, sehingga perlu diantisipasi melalui upaya yang lebih serius dari pihak sekolah. Jika ditinjau dari perspektif implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa siswa memiliki pemahaman kognitif yang baik, tetapi tidak didukung oleh pola interaksi yang memfasilitasi penerapan nilai tersebut. Dalam kenyataannya, nilai kemanusiaan baru akan bermakna ketika siswa tidak hanya memahaminya, tetapi juga mampu menggunakannya untuk membangun hubungan yang sehat, merespon konflik secara dewasa, dan menjunjung keadilan dalam interaksi sosial. Ketika mekanisme penyelesaian konflik tidak berjalan secara optimal, maka penerapan nilai kemanusiaan cenderung tidak terfasilitasi secara maksimal dalam praktik kehidupan sekolah, dan pada akhirnya hanya berhenti sebagai pengetahuan yang tidak memberi dampak nyata pada perilaku.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik di kalangan siswa masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi kemampuan siswa sendiri maupun dari dukungan lingkungan sekolah. Sekolah perlu memperkuat budaya dialog, meningkatkan kualitas layanan bimbingan konseling, dan memberikan ruang yang lebih besar bagi siswa untuk melatih kemampuan komunikasi dan empati. Selain itu, guru perlu lebih aktif terlibat sebagai pendamping dan mediator agar siswa merasa memiliki tempat yang aman untuk menyelesaikan masalah interpersonal. Tanpa langkah-langkah tersebut, implementasi nilai kemanusiaan berpotensi tidak berjalan secara optimal dalam kehidupan sekolah, dan siswa akan terus kesulitan menerjemahkan nilai tersebut ke dalam tindakan nyata dalam menghadapi konflik.

1.3 Implementasi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Interaksi Antarsiswa di Sekolah

Berbagai bentuk konflik dan upaya penyelesaian menunjukkan bahwa hubungan antarsiswa sesungguhnya membutuhkan dasar moral yang kuat agar masalah antarsiswa tidak berulang. (Safira & Dasalinda, 2024) menegaskan bahwa kualitas interaksi sosial siswa sangat menentukan apakah hubungan antarsiswa berkembang secara positif atau justru memicu terjadinya konflik. Interaksi sosial yang negatif seperti saling mengejek, dominasi kelompok, atau komunikasi yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko munculnya perilaku bullying dan pertentangan antar siswa. Dalam hal ini, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sangat penting karena dapat membimbing siswa untuk saling menghargai dan berinteraksi secara lebih bijaksana. Nilai ini juga sejalan dengan sila kedua Pancasila yang menekankan pentingnya memperlakukan sesama secara adil dan beradab. Ketika siswa memahami bahwa setiap individu memiliki martabat dan hak yang sama, mereka lebih mampu membangun hubungan sosial yang sehat, menghindari konflik, serta menciptakan suasana sekolah yang harmonis.

Menurut (Majid & Andayani, 2011), pendidikan karakter berperan penting dalam menanamkan nilai kemanusiaan melalui pembiasaan perilaku empati, saling menghargai, dan kesadaran moral dalam interaksi sosial. Nilai-nilai tersebut membantu siswa mengendalikan emosi, memahami perbedaan, serta mengembangkan kemampuan bekerja sama, sehingga potensi terjadinya konflik antarsiswa dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter menjadi fondasi penting bagi terciptanya hubungan sosial yang harmonis di lingkungan sekolah.

(Rianto, 2016) menjelaskan bahwa nilai kemanusiaan merupakan landasan moral yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah sebagai ruang pembentukan karakter. Pemahaman siswa terhadap nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan hal yang penting untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis di lingkungan sekolah. Nilai ini memberikan contoh bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati, sehingga perilaku saling menghargai, empati, dan tidak diskriminatif menjadi landasan utama dalam interaksi antarsiswa.

Tabel 5. Penerapan Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di Sekolah

No	Daftar Pernyataan	Frekuensi		Persentase	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Saya memahami makna sila ke-2 Pancasila dalam hal menghargai sesama dan mencegah konflik.	106	5	95,5%	4,5%
2	Guru memberikan perilaku adil, menghargai, dan tidak diskriminatif.	100	11	90,1%	9,9%

3	Sekolah melaksanakan kegiatan yang menumbuhkan nilai kemanusiaan (PPKn, OSIS, Kerja Kelompo, dan Kegiatan Sosial)	107	4	96,4%	3,6%
---	---	-----	---	-------	------

Berdasarkan hasil yang disajikan pada tabel, diketahui bahwa penerapan nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab di lingkungan sekolah dapat disebut pada kategori sangat baik. Hal ini terlihat dari tingkat pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-2 Pancasila. Pada pernyataan pertama, hampir seluruh responden, yaitu sebesar 95,5% menyatakan bahwa mereka memahami makna sila ke-2 Pancasila, terutama dalam hal saling menghargai antarindividu serta upaya mencegah terjadinya konflik di lingkungan sekolah. Sementara itu, hanya sebagian besar responden, yakni 4,5% yang menyatakan tidak memahami hal tersebut.

Tingginya persentase responden yang menyatakan pemahaman ini menunjukkan bahwa nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab telah tertanam dengan baik pada peserta didik secara konseptual. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses pembelajaran, ataupun interaksi sosial sehari-hari di sekolah telah berkontribusi secara efektif dalam membangun kesadaran peserta didik akan pentingnya sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta menyelesaikan permasalahan secara damai.

Mayoritas responden, yaitu sebesar 90,1% menilai bahwa guru telah bersikap adil, menghargai setiap peserta didik, serta tidak melakukan tindakan diskriminatif dalam kegiatan pembelajaran maupun interaksi di lingkungan sekolah. Ini menjelaskan bahwa guru berperan sebagai figure teladan dalam mengimplementasikan nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Namun demikian, masih terdapat 9,9% responden yang menyatakan pandangan sebaliknya, yang mengindikasikan bahwa penerapan sikap adil dan non-diskriminatif belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh peserta didik. Perbedaan penilaian ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman subjektif masing-masing individu, dinamika hubungan antara guru dan peserta didik, serta kondisi pembelajaran yang beragam. Oleh karena itu, sekolah perlu melakukan evaluasi secara berkelanjutan serta meningkatkan profesionalisme guru agar penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan secara konsisten dan merata di lingkungan sekolah.

Pada pernyataan ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh responden, yaitu sebesar 96,4%, menyatakan bahwa pihak sekolah telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuat nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), keterlibatan dalam organisasi siswa seperti OSIS, aktivitas kerja kelompok,

serta partisipasi dalam berbagai kegiatan sosial. Tingginya persentase ini mengindikasikan bahwa sekolah memiliki komitmen yang kuat dalam mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam program dan aktivitas pendidikan, baik secara akademik maupun non-akademik.

Di sisi lain, masih terdapat 3,6% responden yang menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut belum sepenuhnya dirasakan. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program penanaman nilai kemanusiaan masih perlu dioptimalkan agar dapat menjangkau seluruh peserta didik secara merata. Perbedaan persepsi ini dapat disebabkan oleh tingkat partisipasi siswa yang beragam atau kurangnya keterlibatan langsung dalam kegiatan tertentu. Oleh karena itu, sekolah diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas dan pemerataan pelaksanaan kegiatan yang bersifat edukatif dan sosial, sehingga nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dapat diinternalisasi dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

1.4 Dampak Implementasi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab terhadap Konflik Antarsiswa di Sekolah.

Untuk memahami dinamika konflik antarsiswa, terlebih dahulu perlu disadari bahwa nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memiliki peran penting sebagai landasan etika dalam interaksi sosial di sekolah. Nilai ini menegaskan penghargaan terhadap martabat setiap individu, perlakuan yang adil, serta kemampuan untuk berempati dan menghormati perbedaan. Dengan hadirnya nilai-nilai ini dalam kegiatan sehari-hari, sekolah diharapkan mampu membentuk budaya pergaulan yang harmonis dan mencegah munculnya perilaku yang dapat memicu konflik, seperti merendahkan teman, memberi label negatif, atau menutup diri dari kelompok lain.

Pada masa remaja, kualitas hubungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap munculnya konflik. Menurut Palacios et al (2019), remaja yang terlibat dalam perilaku agresif cenderung lebih mudah terlibat dalam pertengkaran atau bahkan menjadi korban konflik itu sendiri. Palacios juga menemukan bahwa program yang menumbuhkan sikap prososial—seperti empati, kerja sama, dan saling menghargai—dapat membantu mengurangi perilaku agresif dan memperbaiki hubungan antarsiswa. Temuan tersebut menguatkan alasan mengapa nilai kemanusiaan relevan untuk dibahas dalam konteks sekolah, karena nilai tersebut merupakan salah satu faktor dalam pembentukan empati, kerja sama, dan penghargaan antarindividu yang diharapkan dapat menekan potensi konflik.

Secara normatif, sila kedua memuat nilai kemanusiaan yang menekankan bahwa suatu tindakan disebut baik apabila selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai inti kemanusiaan dalam Pancasila bertumpu pada prinsip keadilan dan keberadaban, yang kemudian melahirkan nilai kesusilaan seperti tolong-menolong,

saling menghargai, menghormati, bekerja sama, serta memperlakukan orang lain secara manusiawi (Aisyah & Barus, 2023). Dalam ranah pendidikan, nilai kesusilaan berpotensi menjadi landasan penting bagi interaksi sosial di sekolah, karena nilai ini dapat mendorong tumbuhnya kebiasaan sosial yang lebih empatik dan inklusif. Penerapan nilai tersebut di lingkungan belajar kemungkinan turut berkontribusi pada terciptanya hubungan antarsiswa yang lebih menghargai perbedaan.

Selain itu, sila kedua juga mengandung asas perikemanusiaan, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa setiap manusia harus diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Asas ini mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban bagi seluruh manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, ataupun kedudukan sosial (Krismen, 2019). Dengan demikian, penerapan sila kedua tidak hanya bersifat moral, tetapi juga diharapkan membentuk cara pandang yang menolak diskriminasi serta mendorong siswa untuk melihat temannya sebagai sesama manusia yang setara. Prinsip ini berpotensi menjadi bingkai etis yang membantu upaya meminimalkan prasangka, pelabelan negatif, maupun perasaan terpinggirkan dalam interaksi antarsiswa.

Nilai kemanusiaan dan asas perikemanusiaan berpotensi membentuk hubungan antarsiswa yang lebih konstruktif, terutama ketika kesadaran akan kesetaraan martabat mulai diinternalisasi sehingga siswa merasa aman, dihargai, dan dapat berinteraksi secara lebih terbuka tanpa sikap merendahkan atau mengucilkan. Nilai-nilai tersebut juga dapat berfungsi sebagai salah satu mekanisme pencegah perilaku merugikan, seperti pemberian label negatif atau eksklusivitas kelompok, karena penghargaan terhadap sesama mendorong siswa untuk mengontrol respons impulsif dan menjaga iklim pergaulan yang lebih sehat.

Untuk melihat sejauh mana proses tersebut terwujud dalam praktik, penelitian ini menilai tiga indikator utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan potensi konflik, yakni kemampuan memahami perasaan teman sebagai bentuk empati, kecenderungan memberi label negatif, serta intensitas interaksi lintas kelompok, yang bersama-sama mencerminkan penerapan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial siswa sebagaimana dipaparkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Persentase dampak positif implementasi sila kedua

No	Pernyataan	Frekuensi		Persentase	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Saya Jarang mencoba memahami perasaan teman	13	98	11.7%	88.3%
2	Saya mudah memberi pelabelan negatif kepada siswa tertentu	22	89	19.8%	80.2%

3	Saya jarang berinteraksi dengan teman dari kelompok lain	31	80	27.9%	72.1%
---	--	----	----	-------	-------

Berdasarkan Tabel 6 implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab pada aspek hubungan antarsiswa menunjukkan hasil yang baik. Dilihat dari persentase yang didapat, nilai kemanusiaan telah berperan positif dalam menekan potensi konflik.

Indikator pertama menunjukkan bahwa 88,3% siswa menyatakan mereka sering memahami perasaan teman, sehingga secara perseptual sebagian besar siswa merasa mampu berempati. Hal ini menggambarkan bahwa secara kognitif mereka telah mengenali pentingnya memahami emosi orang lain, dan ini dapat dianggap sebagai indikasi dari keberhasilan nilai kemanusiaan pada aspek emosional.

Namun, temuan ini perlu dibaca bersama hasil penelitian Fadillah et al (2025), yang menemukan bahwa meskipun siswa mengetahui konsep empati, toleransi, dan perdamaian, pemahaman tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku nyata. Melalui observasi kelas, penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman moral dan praktik sehari-hari, misalnya siswa masih menunjukkan respons yang mudah menyalahkan teman, kurang peka terhadap kondisi emosional orang lain, serta rendahnya kemampuan menyelesaikan konflik secara damai (Fadillah et al., 2025) . Dengan demikian, tingginya pengakuan empati dalam survei perlu dipahami sebagai cerminan pengetahuan, bukan bukti bahwa empati tersebut telah benar-benar terinternalisasi dalam perilaku.

Persentase 80,2% siswa yang menyatakan tidak mudah memberi label negatif kepada teman dapat menunjukkan kemungkinan bahwa nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab telah berperan dalam interaksi antarsiswa. Sikap ini mencerminkan kecenderungan pengakuan atas martabat individu, selaras dengan prinsip bahwa setiap orang berhak dihormati tanpa direndahkan identitasnya. Pelabelan negatif di lingkungan sekolah tidak hanya memunculkan prasangka, tetapi juga mengubah perilaku siswa hingga terbentuk subkultur pasrah dan merasa terpinggirkan (Nurhavina et al., 2022). Dengan menghindari label, siswa pada dasarnya sedang berupaya menahan proses dehumanisasi yang berpotensi melemahkan rasa percaya diri, mengikis penghargaan terhadap sesama, dan memperbesar jarak sosial antarkelompok. Oleh sebab itu, kecenderungan responden siswa menengah untuk menghindari pelabelan dapat dipandang sebagai indikasi awal manifestasi nilai Pancasila yang menempatkan manusia sebagai subjek yang bernilai. Namun temuan ini masih bersifat perseptual dan memerlukan pengamatan lebih lanjut dalam praktik sosial nyata.

Selanjutnya, interaksi lintas kelompok juga menunjukkan angka positif, yaitu 72,1% siswa tetap berinteraksi dengan teman dari kelompok lain. Persentase

ini memperkuat dua poin sebelumnya: meskipun masih ada jarak antara pemahaman moral dan perilaku empatik, serta masih terdapat kemungkinan munculnya pelabelan negatif, hubungan sosial antarsiswa ternyata tidak selalu membentuk batas yang kaku. Intensitas interaksi antarkelompok yang cukup dapat mengindikasikan bahwa kehidupan sosial di sekolah tidak selalu terbelah secara tajam, sehingga potensi perpecahan masih dapat dikontrol dan dihindari sejak dini.

Interaksi lintas kelompok termasuk dalam bentuk *extended intergroup contact*, yaitu situasi ketika seseorang mengetahui bahwa teman satu kelompoknya memiliki hubungan baik dengan kelompok lain (Yustisia & Hudijana, 2021). Interaksi lintas kelompok dipandang berpotensi mendorong terbentuknya norma sosial yang lebih positif dan menurunkan rasa cemas ketika berinteraksi dengan kelompok berbeda. Dalam konteks implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, interaksi lintas kelompok dapat berfungsi tidak hanya mengurangi kecenderungan untuk memberikan cap negatif pada kelompok lain, tetapi juga membuka ruang pergaulan yang inklusif. Pola pergaulan seperti ini sering kali diinterpretasikan sebagai mekanisme alami untuk mengurangi prasangka, memperluas pemahaman antarsiswa, serta mencegah terbentuknya kelompok pertemanan yang tertutup yang berpotensi menjadi pemicu masalah sosial di sekolah. Dengan demikian, keberlanjutan hubungan antar kelompok ini lebih tepat dipahami sebagai indikasi awal bahwa nilai kemanusiaan mulai tampak dalam praktik antarsiswa. Walaupun kesimpulan ini masih perlu dikontekstualisasikan dan dilihat bersama faktor lain yang memengaruhi terciptanya iklim sekolah yang lebih harmonis dan manusiawi.

Tabel 7. Perentase kendala implementasi sila kedua

No	Daftar Pernyataan	Frekuensi		Persentase	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Lingkungan pertemanan di sekolah cenderung membeda-bedakan	75	36	67.6%	32.4%
2	Pendidikan karakter di sekolah masih kurang terasa	73	38	65.8%	34.2%

Meskipun demikian, temuan positif pada Tabel 6 belum dapat diartikan bahwa nilai kemanusiaan telah berlangsung secara menyeluruh di lingkungan sekolah. Berdasarkan Tabel 7, terlihat bahwa masih terdapat tantangan dalam implementasi nilai kemanusiaan pada tingkat lingkungan sosial dan sistem pendidikan sekolah. Dua indikator dalam tabel ini memperlihatkan sejauh mana struktur sosial dan dukungan institusional turut mempengaruhi kualitas relasi antarsiswa. Tabel ini juga membantu menjelaskan mengapa pada Tabel 6 terdapat kesenjangan antara pengetahuan moral dengan perilaku sosial.

Indikator pertama menunjukkan bahwa 67,6% siswa menilai lingkungan pertemanan di sekolah masih cenderung membeda-bedakan. Angka ini mengindikasikan adanya potensi segmentasi sosial di antara siswa. Segmentasi pengelompokan berdasarkan kedekatan, minat, status sosial, atau latar belakang lazim muncul pada remaja. Hal tersebut termasuk dalam teori identitas sosial, dimana identitas sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari manusia (Eleazer et al., 2022). Sehingga keberadaan kelompok-kelompok eksklusif sebenarnya tidak sepenuhnya dapat dinilai sebagai penyimpangan. Namun, penemuan ini penting diperhatikan karena persepsi mayoritas siswa terhadap eksklusivitas pertemanan berpotensi membatasi ruang interaksi lintas kelompok.

Dalam perspektif sila kedua, kecenderungan pengelompokan yang membatasi relasi antarsiswa ini berpotensi melemahkan prinsip kesetaraan martabat manusia. Sikap membeda-bedakan bukan hanya membentuk batas simbolis antarkelompok, tetapi juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi siswa yang tidak termasuk dalam lingkaran sosial mayoritas. Dalam konteks siswa menengah peserta survei, kondisi seperti ini berisiko menciptakan ruang pergaulan yang tidak sepenuhnya inklusif, meskipun temuan ini masih bersifat indikatif dan berdasarkan persepsi responden. Jika fenomena tersebut dibiarkan tanpa intervensi atau penguatan karakter sosial, potensi konflik interpersonal, perasaan tidak diterima, dan munculnya praktik diskriminatif halus bukan tidak mungkin terjadi. Dengan demikian, tingginya persentase tersebut menunjukkan sinyal bahwa adanya tantangan dalam internalisasi nilai kemanusiaan dalam relasi pertemanan sehari-hari.

Indikator kedua, yaitu 65,8% siswa merasa bahwa pendidikan karakter di sekolah masih kurang terasa. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya institusional dalam menanamkan nilai kemanusiaan mungkin belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Pendidikan karakter merupakan salah satu mekanisme formal dalam membangun moralitas dan empati pada remaja, tetapi persepsi siswa menengah dalam penelitian ini memperlihatkan adanya jarak antara kebijakan dan pengalaman yang mereka rasakan.

Rendahnya persepsi terhadap efektivitas pendidikan karakter dapat menunjuk kemungkinan bahwa program yang diberikan bersifat normatif atau belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam praktik pembelajaran maupun pembiasaan harian. Nilai kemanusiaan idealnya tidak hanya diajarkan melalui penyampaian materi atau aturan tertulis, tetapi melalui keteladanan guru, pola relasi di kelas, dan budaya sekolah yang konsisten. Jika pendekatan yang digunakan masih didominasi formal dan belum terhubung dengan praktik perilaku sehari-hari, terdapat kemungkinan bahwa relevansi nilai tersebut tidak dirasakan secara optimal oleh siswa.

Dengan demikian, internalisasi nilai kemanusiaan tidak hanya bergantung pada kesadaran individual siswa, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas budaya sekolah dan lingkungan sosial yang melingkupinya. Ketika sebagian besar responden merasakan bahwa lingkungan pertemanan masih membeda-bedakan dan pendidikan karakter belum terasa kuat, hal ini mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan secara formal dengan pengalaman sosial yang mereka temui sehari-hari. Ketidaksesuaian tersebut dapat menciptakan apa yang dikenal sebagai *moral dissonance*, yaitu kondisi ketika siswa memahami nilai yang seharusnya diterapkan (seperti bersikap adil, menghargai sesama, dan berempati), tetapi lingkungan sosial sekolah belum sepenuhnya menunjukkan contoh yang konsisten dengan nilai tersebut. Akibatnya, proses internalisasi nilai dapat mengalami hambatan, terutama ketika dukungan lingkungan bagi siswa untuk menerapkan pemahaman moral mereka tidak hadir secara konsisten.

Situasi ini mengisyaratkan perlunya penguatan praktik pendidikan karakter yang lebih kontekstual dan berkelanjutan di lingkungan sekolah. Penguatan nilai kemanusiaan tampaknya tidak cukup dilakukan melalui ceramah atau penyampaian teori, tetapi perlu diwujudkan melalui budaya interaksi yang inklusif, kesempatan berkolaborasi lintas kelompok, serta keteladanan nyata dari guru dan staf pendidikan. Lingkungan pertemanan yang masih terkotak-kotak mengindikasikan bahwa norma inklusivitas mungkin belum sepenuhnya mengakar sebagai budaya dominan. Karena itu, institusi pendidikan perlu menciptakan ruang sosial yang memungkinkan siswa berinteraksi secara lebih luas dan setara. Dengan lingkungan yang mendukung, nilai-nilai seperti empati, penghargaan terhadap martabat sesama, dan perilaku beradab menjadi lebih mungkin berkembang secara alami dalam diri siswa.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sila kedua Pancasila membutuhkan kerja simultan dari dua arah, yaitu dari individu siswa yang memahami nilai kemanusiaan, dan dari institusi pendidikan yang menyediakan ekosistem sosial yang selaras dengan nilai tersebut. Tanpa dukungan budaya sekolah yang kuat, pemahaman siswa mengenai nilai-nilai kemanusiaan berisiko berhenti pada tataran pengetahuan, alih-alih terwujud sebagai praktik nyata dalam hubungan sosial sehari-hari.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab terhadap konflik antarsiswa di sekolah, dapat disimpulkan bahwa siswa memiliki pemahaman berfikir yang tinggi terhadap makna nilai kemanusiaan, namun penerapannya dalam interaksi sosial sehari-hari belum sepenuhnya optimal. Bentuk konflik yang paling sering terjadi adalah konflik

verbal dan konflik berbasis media digital yang sebagian besar dipicu oleh perbedaan karakter, kemampuan pengelolaan emosi yang kurang matang, serta kebiasaan saling mengejek. Rendahnya keterlibatan guru dalam proses penyelesaian konflik menunjukkan bahwa peran pendampingan dan mediasi di sekolah belum berjalan maksimal.

Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai moral yang dipahami siswa dengan perilaku sesungguhnya dalam penyelesaian konflik. Lingkungan sosial yang masih membedakan seta pendidikan karakter yang belum terasa sepenuhnya semakin memperkuat hambatan nilai kemanusiaan. Dengan demikian proses penguatan nilai kemanusiaan tidak hanya memerlukan pemahaman teori tetapi juga membutuhkan dukungan budaya di sekolah, keterlibatan aktif guru, serta ruang yang memadai bagi siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam keseharian.

Saran

Penerapan teknik accidental sampling dalam penelitian ini membuat kemungkinan terjadinya bias sampel karena belum meratanya representasi responden ditinjau dari wilayah, jenjang pendidikan, maupun karakteristik siswa. Selain itu, keterlibatan banyak sekolah yang berasal dari berbagai provinsi menyebabkan perbedaan kondisi lingkungan sekolah dan latar belakang peserta didik menjadi sangat beragam, sehingga pendalaman analisis terhadap dinamika sosial dan konflik di masing-masing sekolah belum dapat dilakukan secara optimal. Dengan demikian, temuan penelitian ini lebih menggambarkan kondisi faktual responden yang terlibat dan tidak ditujukan untuk mewakili seluruh populasi siswa menengah.

Dalam keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk membatasi cakupan kajian pada wilayah atau satuan pendidikan tertentu serta menerapkan teknik pengambilan sampel yang lebih sistematis agar komposisi responden menjadi lebih proporsional. Ruang lingkup penelitian yang lebih terfokus diharapkan memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan kontekstual, sehingga hasil penelitian menjadi lebih spesifik dan relevan dengan kondisi lapangan. Selain itu, penggunaan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif juga direkomendasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam konflik antarsiswa.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Rayhan, S.H., M.H., selaku dosen pengampu Mata Kuliah Pancasila, yang telah memberikan tugas sehingga penulis dapat menyusun artikel ini sebagai

bentuk penerapan materi pembelajaran. Tidak lupa, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada para siswa-siswi dari berbagai sekolah yang telah berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian ini.


Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan kelompok yang telah bekerja sama dengan saling membantu dan berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Kerja sama antar anggota kelompok menjadi bagian penting dalam terselesaikannya tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Aisyah, & Barus, S. (2023). *Pendidikan Pancasila*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Eleazer, J., Teologi, N., Program, /, Magister, S., & Agama, S. (2022). TEORI KONFLIK SOSIOLOGI MODERN TERHADAP PEMBENTUKAN IDENTITAS MANUSIA. In *Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan*, 4(3), 69-76. <https://doi.org/10.23887/jpsu.v4i3.53615>
- Fadillah, A. N., Ferawati, E., Novita, T. N., Hayati, A. A., Permana, F. R., & Maloniso, M. (2025). The Reality of Humanitarian Social Values: Tolerance, Empathy, and Peace in Elementary School. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 19-37. <https://doi.org/10.23917/ijolae.v8i1.10760>
- Hidayati, D., Muryati, S., & Susiatik, T. (2023). *Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dalam Mencegah Perilaku Bullying*. (2), 11-21. <https://doi.org/10.31331/jade.v1i02.2752>
- Holisoh, F., & Nur Azizah Maulidyah. (2023). Implementasi Model Kolaboratif Dalam Mengelola Konflik Antar Siswa Di MTs Negeri 1 Jember. *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(4), 129-138. <https://doi.org/10.59031/jkppk.v1i4.273>
- Izzul Haq, B., Heppy Rochmawati, D., Susanto Fakultas Ilmu Keperawatan, W., Islam Sultan Agung Semarang, U., & Kaligawe Raya No Km, J. (2025). HUBUNGAN ANTARA DAMPAK BULLYING DENGAN PERKEMBANGAN SOSIAL PADA SISWA MTs NEGERI. Retrieved 7(1), 798-799. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP>
- Jerendi, C., Rahmat Syahputra, M., Rifa'i, J., Pd, R. S. I., & Pd, M. (2023). Penerapan Komputasi berbasis Statistik Deskriptif dalam Penelitian Sosial. In *Journal Computer Science and Information Technology* 153(2) 156. Retrieved <http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JCoInT/index>
- Karlioni, E., Saefulloh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Palangka Raya Jalan Yos Sudarso Palangkaraya, A., & Tezara Cionita, I. (2024). *Pengembangan Buku Elektronik Keindonesiaan Sebagai Resolusi Konflik Intergroup Relation Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama*, 9(1), 73-81. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>

- Khairunnisa. (2025). Komunikasi Interpersonal Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Menciptakan Pemahaman Bahaya Narkoba Pada Siswa Madrasah Aliyah Jamiat Kheir Jakarta Pusat. *Interaction Communication Studies Journal*, 2(2), 3-5. <https://doi.org/10.47134/interaction.v2i2.4889>
- Krismen, Y. (2019). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Lickona, Thomas. (2012). *Mendidik untuk membentuk karakter : bagaimana sekolah dapat memberikan pendidikan tentang sikap hormat dan bertanggungjawab* (U. Wahyudin, Ed.; 1st ed.). Bumi Aksara. 183-346. https://books.google.co.id/books/about/Mendidik_Untuk_Membentuk_Karakter.html?id=LT6AEAAAQBAJ&redir_esc=y
- Liliweri, Alo. (2018). *Prasangka, konflik, dan komunikasi antarbudaya* (2nd ed.). Kencana.
- Majid, A., & Andayani, D. (2011). *Pendidikan karakter: Konsep dan implementasinya*. Remaja Rosdakarya.
- Nurhavina, D. (2022). *Labeling Siswa SMA Negeri Jurusan Bahasa di Kota Surabaya Labeling Students of State Senior High Schools majoring in Languages in the City of Surabaya*, 11(1), 15-27. <https://doi.org/10.20473/bk.v11i1.37111>
- Palacios, D., Berger, C., Luengo Kanacri, B. P., Veenstra, R., & Dijkstra, J. K. (2019). The Interplay of Adolescents' Aggression and Victimization with Friendship and Antipathy Networks within an Educational Prosocial Intervention. *Journal of Youth and Adolescence*, 48(10), 2005–2022. <https://doi.org/10.1007/s10964-019-01105-z>
- Rahmat M. (2019). *Ensiklopedia Konflik Sosial*. Semarang: Loka Aksara.
- Rianto, H. (2016). IMPLEMENTASI NILAI KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB DI LINGKUNGAN SEKOLAH. *Jurnal Pendidikan Sosial* 3(1).
- Safira, N., & Dasalinda, D. (2024). Pengaruh Interaksi Sosial terhadap Perilaku Bullying Siswa Kelas X SMA Martia Bhakti. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(2), 534–545. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i2.538>
- Sunarwi, S., & Amin, F. (2025). Dampak dan Tantangan Implementasi Wawasan Multikultural terhadap Penurunan Konflik Antar Siswa di Lingkungan Sekolah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 5728–5734. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1496>
- Umam, A. N., & Listyaningsih. (2018). Implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab di sekolah inklusi SMK Daruttaqwa Suci Manyar Gresik. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 6(2), 626–640. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v6n2.p%25p>
- Wahidin, A., Fitriani, T., & Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Pangandaran, S. (2023). STRATEGI MENGELOLA KONFLIK SISWA OLEH GURU BK SEBAGAI UPAYA MENGELOLA MANAJEMEN KONFLIK DI MTsS YPK CIJULANG. In *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 589-594. DOI:[10.55681/sentri.v2i3.594](https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.594)
- Zulpicha, E. (2017). Konflik Kebijakan Penggunaan Sistem Bahasa Isyarat Indonesia di Lingkungan Pendidikan Formal, 6(1), 1-22. <https://doi.org/10.20961/jas.v6i1>

Biografi Singkat Penulis

No	Foto Penulis	Biografi
1		Nama : Dea Elvira TTL : Jakarta, 01 April 2006 Agama : Islam Jenis Kelamin : Perempuan Email : elviradea76@gmail.com
2		Nama : Riska Gusgiani TTL : Serang, 07 Agustus 2006 Agama : Islam Jenis Kelamin : Perempuan Email : riskagusgiani786@gmail.com
3		Nama : Delicia Nurhidayah TTL : Cilegon, 06 Juni 2006 Agama : Islam Jenis Kelamin : Perempuan Email : deliciaanurh@gmail.com
4		Nama : Fauzia Isnaeni TTL : Ciamis, 26 Juli 2005 Agama : Islam Jenis Kelamin : Perempuan Email : fauziaisnaeni18@gmail.com